



1. ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN ACTION (ACEH TRANSAKSI ONLINE) PADA PT. BANK SYARI'AH BANDA ACEH  
*Rifa Nabila, Yulindawati, Ismail Rasyid Ridla Tarigan (Universitas UIN Ar-Raniry)*
2. PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH  
*Syamsidar, Desy Purnamasari, Hendri Mauliansyah, Najiba Maisura (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
3. PENGARUH DIMENSI ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WORM) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MOBILE MARKET PLACE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Kajian Pada Masyarakat Pengguna Shopee di Kota Sabang)  
*Adelina Ryanti, Seri Murni (Universitas Islam Aceh)*
4. ANALISIS PERBEDAAN LABA MENURUT AKUNTANSI DENGAN LABA FISKAL PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH  
*Eva Susanti, Emmi Suryani, Nurizka Fitria (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
5. PENGARUH DUKUNGAN TEMAN SEJAWAT, KEPUASAN GAJI DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIFITAS PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH  
*Putri Mauliza., Filia Hanum, Fitriliana, Juwita, Nelly (Universitas Serambi Mekkah)*
6. PENGARUH SOLVABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021- 2022  
*Noor Laila., Zulkifli Umar, Elviza, Budi Safatul Anam, (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
7. PENGARUH PERSEDIAAN BARANG DAN PENJUALAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN  
*Cut Putri Nauli, Ika Rahmadani, Sari Maulida Vonna, Dewi Sartika (Universitas Teuku Umar)*
8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
*Cut Hamdiah, Hendri Mauliansyah (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
9. PENGARUH MANAJEMEN ASET DAN MANAJEMEN HUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
*Nabila Nada Savira, Intan Rizkia Chudri, Surya Fatma, Irmawati (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
10. RASIO KEUANGAN DAN FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
*Ginanti, Dara Angreka Soufyan (Universitas Teuku Umar)*

## DEWAN REDAKSI

### PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha
4. Para Wakil Dekan Unmuha

Penanggungjawab:

**Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Ketua Penyunting:

**Budi Safatul Anam, S.E., M.Si.**

Wakil Ketua Penyunting:

**Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si.**

Penyunting Pelaksana:

1. **Dr. Dwi Cahyono, M.Si.. Akt.** (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. **Dr. Ramli Gadeng, M.Pd.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. **Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. **Dr. Sri Suyanta, M.Ag.** (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. **Taufik A Rahim, SE., M.Si., Ph.D.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. **Drs.Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.. MM.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : **Hendri Mauliansyah, S.E., M.Si.**
2. Adm.& Keuangan : **Rusnaldi, SE., M.Si.**
3. Distribusi & Pemasaran : **Elviza, SE.. M.Si.**
4. Pengelola IT : **Devi Kumala, S.Si., M.Si.**

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Jl. Muhammadiyah No. 91 Desa Batoh  
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

# KATA PENGANTAR

## REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan Stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

**Dr. Aslam Nur., M.A**

## KATA PENGANTAR

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 12 no.2 Edisi Juli-Desember 2022 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

**Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM.**

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi .....	i
Kata Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh .....	ii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Pedoman Penulisan .....	v

Jurnal

<b>1. ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP LAYANAN ACTION (ACEH TRANSAKSI ONLINE) PADA PT. BANK SYARI'AH BANDA ACEH</b> <i>Rifa Nabila, Yulindawati, Ismail Rasyid Ridla Tarigan .....</i>	1-18
<b>2. PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH</b> <i>Syamsidar, Desy Purnamasari, Hendri Mauliansyah, Najiba Maisura .....</i>	19-38
<b>3. PENGARUH DIMENSI ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WORM) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MOBILE MARKET PLACE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Kajian Pada Masyarakat Pengguna Shopee di Kota Sabang)</b> <i>Adelina Ryanti, Seri Murni, .....</i>	39-59
<b>4. ANALISIS PERBEDAAN LABA MENURUT AKUNTANSI DENGAN LABA FISKAL PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH</b> <i>Eva Susanti, Emmi Suryani, Nurizka Fitria .....</i>	60-77
<b>5. PENGARUH DUKUNGAN TEMAN SEJAWAT, KEPUASAN GAJI DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIFITAS PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH</b> <i>Putri Mauliza., Filia Hanum, Fitriliana, Juwita, Nelly. ....</i>	78-89
<b>6. PENGARUH SOLVABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021- 2022</b> <i>Noor Laila., Zulkifli Umar, Elviza, Budi Safatul Anam, i.....</i>	90-107
<b>7. PENGARUH PERSEDIAAN BARANG DAN PENJUALAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN</b> <i>Cut Putri Nauli, Ika Rahmadani, Sari Maulida Vonna, Dewi Sartika.....</i>	108-123
<b>8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b> <i>Cut Hamdiah, Hendri Mauliansyah .....</i>	124-139
<b>9. PENGARUH MANAJEMEN ASET DAN MANAJEMEN HUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</b> <i>Nabila Nada Savira, Intan Rizkia Chudri, Surya Fatma, Irmawati .....</i>	140-157
<b>10. RASIO KEUANGAN DAN FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</b> <i>Ginanti, Dara Anggreka Soufyan .....</i>	158-173

## METODE PENULISAN

### BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*Research Paper*) atau artikel ulasan (*Review*) dan resensi buku (*Book Review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

### CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e\_mail: [jurnalfeunmuha@yahoo.com](mailto:jurnalfeunmuha@yahoo.com).

### FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

#### A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

##### I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

##### II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

##### III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

### B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

#### I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

#### II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

#### III. KESIMPULAN DAN SARAN

### C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

### Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS  
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN PROVINSI ACEH**

*Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA<sup>1</sup>, Desy Purnamasari, SE, M.Si.<sup>2</sup>, Hendri Mauliansyah, SE, M.Si.<sup>3</sup>,  
Najiba Maisura<sup>4</sup>*

<sup>1,2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Aceh

<sup>3</sup> Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh secara simultan dan secara parsial. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik.

***Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aktivita Pengendalian, Akuntabilitas Keuangan***

***THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS AND  
CONTROL ACTIVITIES ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT  
AGENCY ACEH PROVINCE FINANCE***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the influence of the regional financial accounting system and control activities on financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency simultaneously and partially. The sample in this study was 79 employees at the Aceh Province Financial Management Agency. The research method used is a quantitative method. This research uses multiple linear regression data analysis techniques. The research results show that simultaneously and partially the regional financial accounting system and control activities influence financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency. The conclusion in this research is that the regional financial accounting system and control activities influence financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency both simultaneously and partially. This is because the regional financial accounting system and control activities function as one unit in realizing good financial accountability of the Aceh Provincial Financial Management Agency.*

***Keywords: Regional Financial Accounting System, Control Activities, Financial Accountability***



## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi mencakup kegiatan mencatat, meng-ikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi-kan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi menghasilkan laporan berbentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya.

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa keuangan yang lebih adil, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabilitas. Salah satu cara dengan penyempurnaan sistem akuntansi pemerintahan secara menyeluruh dengan menerbitkan peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Membangun sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintahan Daerah merupakan salah satu solusi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh untuk mengelola keuangan, baik transaksi yang berkaitan dengan anggaran, operasi maupun aset, kewajiban dan ekuitas, sehingga pada akhir periode dapat dihasilkan laporan keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang dimiliki masih belum mencapai target, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik. Realisasi anggaran penggunaan sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh**

Tahun	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	Persentase
2020	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	21.844.688.713	16.136.743.430	74%
2021	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	17.329.216.412	11.095.423.099	64,03%
2022	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	20.206.317.727	17.121.452.114	84,73%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 74% atau sebesar Rp.16.136.743.430 dari Rp. 21.844.688.713, yang berarti sisa anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 5.707.945.282. Pada tahun 2021 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator sebesar 64,03% atau sebesar Rp. 11.095.423.009 dari Rp 17.329.216.412 yang berarti ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 6.233.793.313. Pada tahun 2022 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi

pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 84,73% atau sebesar Rp 17.121.452.114, dari Rp 20.206.317.727, yang berarti ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 3.084.865.613.

Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No.219 Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23114. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah berupaya seoptimal mungkin mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mensukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang terjadi berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh pada tahun 2021 bahwa terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh yaitu kurangnya sumber daya manusia/pegawai secara kualitas dan kuantitas khususnya bagian IT dalam menunjang peningkatan pelayanan dalam pengoptimalisasi realisasi pendapatan. Kemudian sarana dan Prasarana yang belum memadai terkait tercapainya kinerja, proses pengadaan yang mengalami perubahan ketentuan sehingga menyulitkan tercapainya realisasi kegiatan di awal tahun. (<https://bpka.acehprov.go.id/>).

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan yaitu masalah tentang sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang rendah maka dapat berdampak pada kemampuan aparatur dalam menguasai sistem akuntansi dan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan. Saat ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia/pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia/pegawai secara kuantitas sumber daya manusia/pegawai dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang peningkatan optimalisasi penerimaan pendapatan Aceh.

Berdasarkan uraian dan fenomena masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh”**.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Akuntabilitas Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018:18) menyatakan akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2019:1) menyatakan akuntansi publik adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan publik.

Menurut Bastian (2019:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Halim (2018:18) mendefinisikan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung-jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola keuangan (desentralisasi), telah menunjukkan pelaporan keuangan menjadi pengendali dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan kualitas laporan keuangan serta manajemen.

Mulyadi (2019:42) mengungkapkan di dalam akuntabilitas terdapat tiga indikator yaitu :

#### 1. Motivasi

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan-nya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

#### 2. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi

### 3. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Rasdianto (2017:6) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Rahayu, 2017:2).

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68).

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan

keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2017).

Romney (2019:3) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Romney (2019:12) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

- 1) Tujuan  
Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuan nya.
- 2) Masukan  
Data harus dikumpul dan dimasukan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.
- 3) Keluaran  
Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
- 4) Penyimpanan data  
Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
- 5) Pengolahan  
Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
- 6) Instruksi dan prosedur  
Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.

7) Pengguna

Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna yang meliputi semua orang yang melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.

8) Pengendalian dan pengukuran konsumen

Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

Menurut Sholeh (2017;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Menurut Halim (2018:94) indikator untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian

Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan salah satu fungsi penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.

### 3. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

### 4. Pelaporan

Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

## Aktivitas Pengendalian

Istilah pengendalian berasal dari bahasa inggris yaitu "*control*" adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari akuntansi. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Mardiasmo,2018:76).

Menurut Arens (2018:37) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan perintah manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengatasi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepadakerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literature manajemen.

Mardiasmo (2018:98) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi :

1. Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
4. Evaluasi secara independen atas kinerja
5. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan.

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen untuk mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan yang akan dilakukan. Menurut Arens



(2018:37) Indikatornya untuk variabel Aktivitas Pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Harus sesuai Prinsip Akuntansi;
2. Perekrutan dan Pengembangan SDM;
3. Tugas Prosedur dalam Pekerjaan;
4. Kesesuaian;
5. Pemisahan Tugas;
6. Independen.

## **Kerangka Pemikiran**

### **1. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan daerah Dengan Akuntabilitas Keuangan**

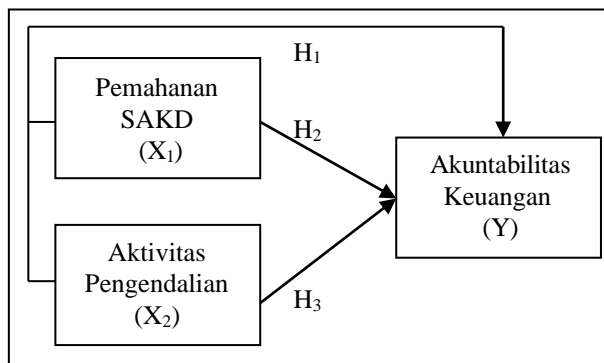
Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

### **2. Hubungan Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Keuangan**

Aktivitas pengendalian menolong meyakinkan bahwa pengarahan atasan instansi pemerintah dilakukan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Seorang auditor tidak hanya memiliki peran untuk menilai laporan keuangan klien, akan tetapi auditor harus dapat memberikan rekomendasi atas hasil kerjanya, seorang auditor juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengungkapkan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan tersebut, tentunya harus berdasarkan pada bukti yang nyata, agar hasil kerja yang diperoleh auditor berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntansi keuangan. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Arikunto, 2016). Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

H<sub>2</sub> : Sistem akuntansi keuangan daerah ber-pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

H<sub>3</sub> : Aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

### METODE PENELITIAN

#### Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 377 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Penentuan ukuran sampel ini dilakukan melalui teknik teori Slovin menurut Umar (2016:49).

Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 79 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan data dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* merupakan dimana peneliti berusaha menarik anggota populasi berdasarkan kemudahan ditemui atau ketersediaan anggota populasi tentu saja (Sugiyono, 2018:81).

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dikumpul-kan penulis dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari organisasi atau individu yang diteliti, melalui pembagian kuisisioner. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden di lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan objek penelitian ini, penulis melakukan kegiatan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden (Arikunto, 2018). Dalam teknik kuisisioner diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan mengikuti skala pengukuran skala likert. Dalam skala likert, jawaban yang mendukung pertanyaan diberi skor berdasarkan jawaban masing-masing responden (Umar, 2017). Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan.

### Defenisi dan Operasional Variabel

Variabel operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel *independent* yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Aktivitas pengendalian ( $X_2$ ), sedangkan yang menjadi variabel *dependen* yaitu Akuntabilitas Keuangan ( $Y$ ).

### Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi berganda. Dilihat dari jenis penelitian ini yang merupakan penelitian korelasi, metode analisis data dengan menerapkan analisis regresi berganda menjadi suatu pilihan yang patut digunakan.

Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Dengan analisis regresi berganda maka dapat seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Sarwono, 2017:158). Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Akuntansi keuangan (Y)

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Sistem akuntansi keuangan daerah

$X_2$  = Aktivitas pengendalian

$e$  = *Standard error*

### **Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan:

1. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan:

- Jika  $\beta_i$  ( $i = 1, 2$ ) = 0 : artinya sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
- Jika  $\beta_i$  ( $i = 1, 2$ )  $\neq 0$ , : artinya sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

2. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial: Kriteria pengujiannya adalah:

- Jika  $\beta_1 = 0$ , artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
- Jika  $\beta_1 \neq 0$ , artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
- Jika  $\beta_2 = 0$ , artinya aktivitas pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
- Jika  $\beta_2 \neq 0$ , artinya aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019:95). Jika Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y, dimana  $0 < R^2 < 1$ .

Sebaliknya, jika  $R^2$  semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

Pada penelitian ini *R Square* yang digunakan adalah *R Square* yang sudah disesuaikan atau *Adjusted R Square* (*Adjusted R<sup>2</sup>*) dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Pengaruh Variabel Bebas terhadap**  
**Akuntabilitas keuangan**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,195	,511		4,293	,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ )	,291	,081	,375	3,588	,001
Aktivitas Pengendalian ( $X_2$ )	,255	,083	,355	3,072	,008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Akuntansi (Y)

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,195 + 0,291X_1 + 0,255X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. Koefisien Regresi ( $\beta$ )

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 2,195 artinya bila mana sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan aktivitas pengendalian ( $X_2$ ), dianggap konstan, maka akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, adalah memiliki nilai 2,195 pada satuan skala likert.
- b. Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,291. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh sebesar 29,1% dengan asumsi variabel aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) sebesar 0,255. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel aktivitas pengendalian secara relatif akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh sebesar 25,5% dengan asumsi variabel Sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_1$ ) dianggap konstan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa dari ke dua variabel yang diteliti ternyata variabel sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan Akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, karena diperoleh koefisien regresi sebesar 29,1%.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### 1. Hasil Pengujian Secara Simultan dan Parsial

Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan aktivitas pengendalian secara simultan maupun secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Dalam uji simultan dapat dilihat berdasarkan Tabel 2 dengan cara berikut:

a. Secara simultan

-  $H_1$  :  $\beta_1 = 0,291$ ,  $\beta_2 = 0,255$ , maka  $\beta_1 \neq 0$ ,  $\beta_2 \neq 0$ , : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh

b. Secara parsial

-  $H_2$  :  $\beta_1 = 0,291$ ,  $\beta_1 \neq 0$ , Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial ber-pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh

-  $H_3$  :  $\beta_2 = 0,255$ ,  $\beta_2 \neq 0$ , Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

### 2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 4.8**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,717 <sup>a</sup>	0,474	0,452	0,79278

a. Predictors:(Constant), Aktivitas pengendalian (X<sub>2</sub>), Sistem akuntansi keuangan daerah ( X<sub>1</sub>)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas keuangan ( Y )

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,717 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 71,7%. Artinya faktor sistem akuntansi keuangan daerah (X<sub>1</sub>) dn aktivitas pengendalian (X<sub>2</sub>) mempunyai hubungan yang kuat terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,452 artinya

bahwa sebesar 45,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan aktivitas pengendalian ( $X_2$ ). Sedangkan selebihnya sebesar 54,8% dijelaskan oleh faktor variabel lain yaitu sumber daya manusia, budaya, sarana yang memadai dan lainnya.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan tabel 2, pengujian secara simultan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian bersama terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

### **2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan tabel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,291 yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0,291 dengan hasil perhitungan  $\beta_1 \neq 0$ , dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk

memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja tidak hanya terpaku pada aspek finansial saja seperti yang sering kita ketahui, tetapi terdapat beberapa dimensi lainnya atau aspek dari akuntabilitas itu sendiri yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (Syamsidar, et al., 2022).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Beberapa dampak dari sistem akuntansi keuangan daerah antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan, memungkinkan adanya integrasi antara berbagai modul atau bagian dalam sistem akuntansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat dan terkini pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Selain itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, memudahkan pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan organisasi dan meminimalkan risiko kesalahan dan penyalah-gunaan dalam pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

### **3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan tabel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk aktivitas pengendalian adalah sebesar 0,255 yang berarti aktivitas pengendalian mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai  $\beta_2$  sebesar 0,255 dengan hasil perhitungan  $\beta_2 \neq 0$ , dapat disimpulkan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Aktivitas pengendalian memiliki dampak yang baik terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Beberapa dampak positif dari aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh antara lain meningkatkan keandalan dan keakuratan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian memastikan adanya dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait transaksi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan kepada pihak yang



berkepentingan dan memperkuat pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak baik bagi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan, memungkinkan adanya integrasi antara berbagai modul atau bagian dalam sistem akuntansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat dan terkini pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
3. Aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal disebabkan aktivitas pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh berdampak baik terhadap akuntabilitas keuangan antara lain meningkatkan keandalan dan keakuratan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku dan mencegah terjadinya penyalah-gunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas misalnya pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparat pemerintah dibuktikan dengan berbagai pencatatan.

2. Disarankan pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat mengadakan pelatihan kerja kepada pegawai misalnya pada bagian akuntansi atau pelaporan keuangan yang sesuai pekerjaan pegawai agar kompetensi pegawai semakin meningkat.
3. Disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh agar dapat mempublikasi aktivitas pengendalian sesuai dengan prosedur misalnya setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.
4. Penelitian berikutnya diharapkan agar memperluas populasi penelitian dan menambah variabel lain karena masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung kualitas pehasil kerja aparatur seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan pengalaman aparatur.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Arens, Alvin A. (2018). *Auditing & Jasa Assuransce*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto, Suharsimi, (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra.(2019). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Multivariate Dengan SPSS*, Semarang: Universitas Dipanegoro.
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Star*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.44>
- <https://bpka.acehprov.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta:Penerbit. Andi.
- Mulyadi. (2019). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- PP No. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahayu, S. K. & Ely, S. (2017). *.Auditing*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2019). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U dan Bougie. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba.
- Soleha, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13, No. 1, 1-14.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syamsidar,. Gadeng, T., & Chairunnisa, P. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 12 (1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1390>
- Syamsidar,. Mulyadi, AR., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21>
- Umar, Husein. (2017). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang *keuangan Negara*.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>